

**ANALISIS MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS  
CO-MANAGEMENT SUMBER DAYA PERIKANAN TERHADAP  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Dinas Perikanan di Kabupaten Lampung Selatan)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh**

**M. Saifullah  
NPM : 1651010157**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**ANALISIS MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS  
CO-MANAGEMENT SUMBER DAYA PERIKANAN TERHADAP  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Dinas Perikanan di Kabupaten Lampung Selatan)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh**

**M. Saifullah  
NPM : 1651010157**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Hanif, S.E., M.M.  
Pembimbing II : Dimas Pratomo, S.E.I., M.E**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

### **Analisis Model Pengembangan Ekonomi Berbasis *Co-Management* Sumber Daya Perikanan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Perikanan di Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh  
**M. Saifullah**

Indonesia sebagai negara kepulauan dan daerah lautnya lebih luas daripada luas daratan, memiliki potensi perikanan tangkap yang besar. Nelayan adalah salah satu profesi pekerjaan yang banyak ditekuni di Indonesia. Penghasilan masyarakat nelayan pada umumnya akan memberikan dampak kesejahteraan bagi hidup nelayan itu sendiri. Pengelolaan sumber daya perikanan yang baik akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan nelayan. Pada penelitian ini akan dibahas pengelolaan perikanan dengan model *co-management* atau pengelolaan bersama. Namun adakalanya pendapatan para nelayan bergantung pada keadaan alam, cuaca, dan kondisi ombak laut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif implementasi model *co-management* perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan, serta ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Adapun penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari lisan. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, mengenai aktifitas ekonomi masyarakat nelayan Lampung Selatan.

Hasil dari penelitian ini adalah nelayan mampu memenuhi kebutuhan ekonominya dari melaut, karena kemudahan akses membeli bahan bakar, menjual ikan, mendapatkan modal pinjaman dari *stakeholder* terkait. Pengelolaan dengan model *co-management* membawa dampak positif terhadap kesejahteraan nelayan atau keluarganya semakin terpenuhi baik kebutuhan primer maupun sekunder. Maka diasumsikan keluarga nelayan akan semakin baik. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, pengelolaan perikanan dengan model *co-management* yang dilakukan, telah sesuai dengan syariat Islam yang menganjurkan bahwa pengelolaan ekonomi harus bertanggung jawab dan adil, yang pada akhirnya masyarakat akan sejahtera.

**Kata kunci:** Masyarakat Nelayan, *Co-Management*, Kesejahteraan



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260*

**SURAT PERNYATAAN**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. Saifullah  
NPM : 1651010157  
Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “

**Analisis Model Pengembangan Ekonomi Berbasis *Co-management* Sumber Daya Perikanan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Perikanan di Kabupaten Lampung Selatan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Bandar Lampung, Februari 2023  
Penyusun



**M. Saifullah**  
**1651010157**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suramin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Analisis Model Pengembangan Ekonomi Berbasis Co-management Sumber Daya Perikanan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Perikanan di Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama : **M. Saifullah**  
NPM : **1651010157**  
Program Studi : **Ekonomi Syariah**  
Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hanif, S.E., M.M.**

**Dimas Pratomo, M.E.**

**NIP. 1974082320000031001**

**NIP. 199305282018011003**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam**

**Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy.**

**NIP. 198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **Analisis Model Pengembangan Ekonomi Berbasis *Co-management* Sumber Daya Perikanan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Perikanan di Kabupaten Lampung Selatan)**. Disusun oleh **M. Saifullah**. Npm. 1651010157  
Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Hanif, S.E, M.M.**

**Sekretaris : Erlin Kurniati, M.M**

**Penguji I : Vicky F. Sanjaya, M.Sc**

**Penguji II : Dimas Pratomo, M.E**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Prof. Dr. Tulus Suryanto, SE, M.M, Akt, CA**

**NIP. 197009262008011008**

## MOTTO

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا  
تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“Dia-lah, Allah yang menundukan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur”*  
(QS. An-Nahl: 14)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT atas pertolongan-Nya, kasih sayang-Nya dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

1. Kepada Orang Tua ku tercinta yakni Bapak Seno dan Ibu Rodiah, yang selama ini selalu sabar menjaga dan merawatku sampai saat ini, memberiku semangat dan mencurahkan jiwa dan raganya hanya untuk segera melihat anaknya menyelesaikan perkuliahannya, yang jasanya tidak mungkin dapat aku balas sampai kapanpun, tiada kata-kata yang dapat terucap dari lisan anakmu ini atas segala pengorbanan dan do'a-do'a yang telah engkau panjatkan untukku. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Saudara-saudara kandungku yang tersayang yakni kakakku Eko Devi Yanto dan Istrinya Yusiana Dewi yang telah memberikan semangat dan selalu memotivasiku selama kuliah dalam menyelesaikan skripsi.
3. Keluarga Besar Ma'had Al-Jamiah, Ustad Kamran As'ad Irsyadi, Ustad Muhammad Nur, semua Murobbi Ma'had Al-Jamiah, semua pengurus Ma'had Al-Jamiah, mahasantri angkatan 2016, khususnya mahasantri putra, kepada Agid, Roni, Amar, Aji, Dani, Hamim, Dafi, Manan, Kurniawan, Andhika, Adi, Salim, Teni, dan Kak Rihal, yang selalu saling mendukung dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Keluarga besar Kelompok Kerja Nyata (KKN) kelompok 166 Desa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus, Deni, Awen, Sandi, Diyas, Yuri, Nia, Echa, Evi, Dilla, Jaya, dan Tomi, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.



5. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Penerima Bidikmisi (AMPIBI) yang telah menerima sebagai keluarga besar dan terimakasih atas segalanya. Terimakasih semangat dan motivasi nya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga Besar satu angkatan Ekonomi Syariah Angkatan 2016, khususnya Ekonomi Islam B, Irfan, Naufal, Endang, Suchi, Ferdiana, Putri, Jalil, Suci Justika, Salim, Rofik, Okta dan teman-teman yang lain, terim kasih selama kuliah udah kerja sama dan saling memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama M. Saifullah di lahirkan di Sidomulyo Lampung Selatan pada tanggal 21 Januari 1997. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Seno dan Ibu Rodiah. Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. SDN 03 Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2010.
2. SMPN 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2013.
3. SMAN 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2016.
4. Pada Tahun 2016 juga terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada tahun 2016 hingga 2018 terdaftar sebagai santri Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

Selama Menjadi Mahasiswa, aktif mengikuti kegiatan intra dan ekstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Analisis Model Pengembangan Ekonomi Berbasis Co-Management Sumber Daya Perikanan Terhadap Peningkatan Nelayan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. para sahabat dan Pengikutnya semoga mendapat syafaatnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, SE, M.M, Akt. CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E., Sy selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah yang selalu memberikan dukungan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hanif, S.E., M.M. selaku Pembimbing I yang senantiasa tanggap terhadap mahasiswa bimbingannya dalam memberikan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dimas Pratomo, M.E selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, usulan perbaikan dengan sabar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebaik mungkin.
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, pimpinan dan karyawan perpustakaan UIN yang telah memberikan informasi, referensi dan lain-lain.

6. Kepada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan dan perangkat Desa dan nelayan yang telah membantu dan memberikan informasi dan layanan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat seperjuangan angkatan 2016 program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya kelas B yang selalu bersama dalam belajar dan berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan terimakasih atas motivasi dan dukungan dari kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga ilmu yang kita dapatkan berkah dunia akhirat.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Februari 2023  
**Penulis,**

**M. Saifullah**  
**NPM. 1651010157**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Terdahulu yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep <i>Co-Management</i> .....	25
B. Konsep Kesejahteraan .....	35
C. Ekonomi Islam .....	42
D. Kerangka Berpikir .....	45
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan .....	47
B. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan .....	48
C. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan .....	52

## **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Model Pengelolaan Berbasis *Co-Management* Perikanan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan ..... 59
- B. Peran Nelayan Dalam Model Pengelolaan Berbasis *Co-management* Perikanan..... 63
- C. Peran *Stakeholders* (Pemegang Kepentingan) Perikanan Dalam Model Pengelolaan Berbasis *Co-Management* Perikanan ..... 68
  - 1. Peran PPI (Pusat Pendaratan Ikan) Dalam Model Pengelolaan *Co-Management* Perikanan..... 69
  - 2. Peran Kelompok Nelayan Dalam Model Pengelolaan *Co-Management* Perikanan..... 71
  - 3. Peran Pemilik Kapal dalam Model Pengelolaan *Co-Management* Perikanan..... 72
- D. Pengelolaan Dengan Model *Co-Management* Perikanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam ..... 74

## **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 79
- B. Rekomendasi ..... 81

## **DAFTAR RUJUKAN**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Lampung Tahun 2018-2019.....	5
2. Data Kelompok Nelayan.....	48
3. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Lampung Selatan.....	50
4. Tingkat Pendidikan Responden Masyarakat Nelayan Lampung Selatan .....	53
5. Aspek Ekonomis pada Peningkatan Pendapatan .....	55
6. Beban Tanggungan Keluarga Responden Penelitian Masyarakat Nelayan di Kabupaten Lampung Selatan.....	57
7. Tingkat Kesejahteraan Menurut BKKBN .....	66



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk memudahkan serta memahami proposal ini maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal ini. Berdasarkan penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul **“Analisis Model Pengembangan Ekonomi Berbasis Co-Management Sumber Daya Perikanan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Perikanan di Kabupaten Lampung Selatan)”**.

Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, dan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>1</sup>
2. **Model** adalah jembatan antara dunia nyata (*real world*) dengan dunia berpikir (*thinking*) untuk memecahkan suatu masalah.<sup>2</sup> Dalam ilmu ekonomi, model ekonomi didefinisikan sebagai konstruksi teoritis atau kerangka analisis ekonomi yang terdiri dari himpunan konsep, definisi, anggapan, persamaan, kesamaan (identitas) dan ketidaksamaan dari mana kesimpulan akan diturunkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, 2008) hal. 60

<sup>2</sup> Akhmad Fauzy dan Suzy Anna, *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019) hal. 4

<sup>3</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jogjakarta: Penerbit Erlangga, 2009) hal. 23



3. **Pengembangan ekonomi** atau pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita, jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan riil juga untuk meningkatkan produktivitas.<sup>4</sup>
4. **Co-Management/Colaborative management** yang berarti dalam Bahasa Indonesia kolaborasi manajemen, *Co-Management* perikanan dapat didefinisikan sebagai pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya perikanan.<sup>5</sup>
5. **Perikanan** adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.<sup>6</sup>
6. **Peningkatan** adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan dan sebagainya).<sup>7</sup>
7. **Kesejahteraan** tergantung pada bagaimana pandangan seseorang terhadap kehidupan seseorang, orang kaya belum tentu lebih sejahtera dibandingkan dengan orang miskin, kekayaan akan menambah kebahagiaan kalau kekayaan itu menambah alat-alat pemuas kebutuhan dan bukannya menambah jumlah kebutuhan.<sup>8</sup>
8. **Ekonomi Islam** adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui

---

<sup>4</sup> Irawan, dan M. Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan Edisi Keenam*, (Jakarta: BPFE Yogyakarta, 2002) hal. 5

<sup>5</sup> A. Muluk Alains, dkk, "*Pengelolaan Sumberdaya perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM) melalui model Co-Management Perikanan*" *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10 No. 2 2019, hal. 174

<sup>6</sup> UU NO 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

<sup>7</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, 2008) hal. 1529

<sup>8</sup> Irawan, dan M. Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan Edisi Keenam*, (Jakarta: BPFE Yogyakarta, 2002) hal. 8-9

alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>9</sup>

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup>. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km<sup>2</sup> adalah lautan dan 2,55 juta km<sup>2</sup> adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km<sup>2</sup> yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.<sup>10</sup>

Masalah kemiskinan nelayan di Indonesia telah menjadi perhatian nasional. Secara umum ada 4 masalah pokok yang menjadi penyebab dari kemiskinan, yaitu terdiri dari: kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan dan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi dan politik. Sementara solusi pengentasan kemiskinan yang ada selama ini seperti program motorisasi, ternyata masih kurang efektif dalam implementasinya, karena kurangnya keterlibatan masyarakat di dalamnya, sementara selama ini partisipasi masyarakat hanya sebatas slogan, rekayasa, dan dipaksakan.<sup>11</sup>

Suatu negara mengalami kemiskinan karena tidak cukupnya sumber-sumber alam yang dimilikinya, memang ada benarnya, terbatasnya sumber-sumber alam yang tersedia baik di kuantitas maupun jenisnya. Dengan sumber daya yang

---

<sup>9</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016) hal. 2

<sup>10</sup> <http://kkp.go.id>

<sup>11</sup> Primyastanto, Mimit, *Ekonomi Perikanan Kajian Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Teknologi Tepat Guna*, (Malang: Intelegensia Media, 2015) hal. 1-2

minimum, maka tidak banyak harapan untuk adanya perkembangan ekonomi.<sup>12</sup>

Provinsi Lampung pada lima bulan awal tahun 2021, nilai ekspor perikanan dari Lampung menyentuh angka lebih dari Rp 1,034 triliun, jumlah ini naik Rp164 miliar dari nilai ekspor sebelumnya Rp870 miliar. Dari sisi komoditas udang masih menjadi andalan provinsi Lampung. Total volume ekspor mencapai 5 juta kilogram dengan nilai Rp811 miliar, jumlah ini setara dengan 69% dari total ekspor dari Lampung. Komoditas ekspor lainnya seperti cumi-cumi dengan volume 213 ribu kilogram senilai Rp18 miliar, lalu komoditas ikan beku dengan volume 348 ribu kilogram senilai Rp22 miliar, dan komoditas rumput laut kering dengan nilai ekspor mencapai Rp2 miliar. Para pelaku usaha perikanan tetap bergeliat ditengah pandemi covid-19, jumlah ini juga naik 129 kali dibanding tahun sebelumnya.<sup>13</sup>

Sesuai keadaan geografis Lampung yang berada di ujung Pulau Sumatera, beberapa kabupaten di Lampung mempunyai banyak potensi perikanan tangkap yang harusnya menjadi keunggulan dibandingkan daerah lain. Potensi perikanan ini tidak hanya menguntungkan bagi nelayan saja, namun banyak pelaku ekonomi yang terlibat disana. Secara umum, pelaku ekonomi di perikanan tangkap dibagi menjadi lima kelompok besar, yaitu rumah tangga keluarga, masyarakat, perusahaan (investor), pemerintah sebagai perwakilan negara. Setiap pelaku ekonomi itu memiliki peran tersendiri dalam kegiatan konsumsi, distribusi, dan produksi.

Rumah tangga keluarga baik rumah tangga non perikanan berperan sebagai produsen dalam kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Rumah tangga keluarga sebagai produsen mereka memiliki tanah, tenaga kerja, modal, keahlian untuk dimanfaatkan.

---

<sup>12</sup> Irawan, dan M. Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan Edisi Keenam*, (Jakarta: BPFE Yogyakarta, 2002) hal. 159-160

<sup>13</sup> kkp.go.id Tahun 2021

**Tabel 1.1**  
**Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut**  
**Menurut**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018-2019**

Kabupaten	2018		2019	
	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)
Lampung Barat	-	-	-	-
Tanggamus	11.495	278.209.019	26.588	882.174.610
Lampung Selatan	25.573	902.698.063	24.203	770.557.050
Lampung Timur	31.417	1.237.371.379	51.312	1.476.680.385
Lampung Tengah	2.605	139.372.393	2945	70.074.714
Lampung Utara	-	-	-	-
Way Kanan	-	-	-	-
Tulang Bawang	19.587	899.480.809	21.598	592.598.164
Pesawaran	14.614	434.120.502	14.881	623.383.055
Pringsewu	-	-	-	-
Mesuji	1.655	56.101.884	2521	129.924.725
Tulang Bawang Barat	-	-	-	-
Pesisir Barat	12.786	502.643.780	4.276	229.017.140
Bandar Lampung	17.019	488.459.227	7.229	254.789.739
Metro	-	-	-	-
<b>Lampung</b>	<b>136.750</b>	<b>4.938.457.056</b>	<b>155.552</b>	<b>5.029.199.582</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2020 dan 2021

Sesuai tabel 1.1 kita bisa lihat, bahwa Kabupaten Lampung Timur adalah penghasil perikanan tangkap terbanyak diprovinsi Lampung, bahkan mengalami kenaikan dari Tahun 2018 ke Tahun 2019. Itu karena disebabkan garis pantai yang panjang. Sedangkan Lampung Selatan mengalami penurunan hasil tangkap. Dengan keadaan ini, seharusnya hasil perikanan tangkap di Lampung Selatan harus dioptimalkan.

Lampung Selatan adalah daerah yang terletak di ujung pulau Sumatera. Dengan letaknya berbatasan laut dengan bentangan garis pantai yang mencapai 200 kilometer, maka potensi hasil perikanan dan kelautan Lampung Selatan sangat besar.

Namun ada beberapa kendala para nelayan yang ada di pesisir, sehingga belum mampu memaksimalkan potensi perikanan tangkap yang ada. Salah satu kendala yaitu kemampuan armada tangkap para nelayan di pesisir Lampung Selatan saat ini masih terbatas. Rata-rata armada yang dimiliki nelayan merupakan armada kapal kecil. Begitu juga dengan alat tangkap para nelayan yang relatif masih sederhana jika dibandingkan dengan para nelayan dari luar Lampung.

Masalah yang umum dihadapi masyarakat pesisir antara lain tingkat kemiskinan (ketidakpastian ekonomi), kerusakan sumberdaya pesisir, dan kesehatan lingkungan, serta pemanfaatan area laut bagi nelayan (akses terbuka dan akses terbuka terbatas). Seringkali sebagian masyarakat yang hidup di pinggir pantai adalah seorang nelayan yang berpenghasilan rendah, dan hidupnya hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, masih tergolong masyarakat miskin. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat pinggir pantai mengalami keadaan kemiskinan. Faktor-faktornya antara lain sumber daya alam yang habis, rusaknya habitat hewan laut dikarenakan penggunaan alat yang merusak, kurangnya pengetahuan nelayan tentang penggunaan alat tangkap yang efisien, dan masih menggunakan peralatan yang sederhana.

Beberapa persoalan serius yang menjadi isu-isu strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut ini, yaitu: (1) Kondisi sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat *common property* (milik bersama) dengan akses yang bersifat *quasi open access*, (2) Adanya degradasi lingkungan pesisir dan laut, (3) Kemiskinan dan kesejahteraan nelayan, (4) Akses pemanfaatan

teknologi yang terbatas, (5) Peraturan dan kebijakan yang kurang kondusif.<sup>14</sup>

Pada dasarnya, pengelolaan perikanan telah diusahakan oleh berbagai belahan di dunia. Para ahli baik dari ahli biologi, ekologi dan ekonomi terus mengembangkan model-model pengelolaan perikanan. Model dibangun atas proses berpikir (melalui indra fisik) dari dunia nyata yang kemungkinan diinterpretasikan melalui proses berpikir, sehingga menghasilkan pengertian dan pemahaman mengenai dunia nyata. Selain itu, model dirancang bukan untuk memecahkan masalah sekali untuk selamanya atau memecahkan semua masalah.<sup>15</sup>

Kebijakan dalam memilih model pengelolaan yang dipilih oleh pemerintahan dan aparatnya ujungnya harus berorientasi pada tujuan. Maka diperlukan analisis kebijakan. Analisis kebijakan merupakan proses analisis yang menerobos pagar disiplin ilmu tertentu dengan tujuan tidak hanya menghasilkan “fakta”, tapi juga tapi juga untuk menghasilkan nilai-nilai dan arah tindakan yang lebih baik. Analisis kebijakan menggunakan berbagai disiplin yang tujuannya bersifat: 1) penandaan (*designative*), 2) indikator *performance*, 3) penilaian (*evaluative*) atas keberhasilan/kegagalan, 4) anjuran (*advocative*) dalam tindakan.<sup>16</sup>

*Co management* yaitu suatu model pengelolaan sumberdaya baik fisik maupun non fisik yang melibatkan berbagai *stakeholder* terkait. Tujuannya selain untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, juga sebagai koreksi, mengingatkan kegagalan praktik pengelolaan baik yang bertumpu pada kebijakan pemerintah maupun yang bertumpu pada masyarakat,

---

<sup>14</sup> A. Muluk Alains, dkk, “Pengelolaan Sumberdaya perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM) melalui model Co-Management Perikanan” Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No. 2, hal. 173

<sup>15</sup> Fauzi, Akhmad dan Suzy Anna, *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019) hal. 4

<sup>16</sup> Mimit Primyastanto, *Ilmu Kelautan dan Perikanan*, (Malang: Intrans Publishing, 2017) hal. 1-3

yang masih memiliki kelemahan mendasar.<sup>17</sup> Kekurangannya jika bertumpu pada pemerintah adalah kurangnya pengawasan kebijakan yang sudah ditetapkan, apalagi kalau daerah tersebut memiliki daerah yang luas. Selain itu biaya yang dibutuhkan sangat besar untuk membantu kebijakan. Lalu jika kebijakan bertumpu pada masyarakat, akan banyak sekali konflik karena persaingan yang tidak terkontrol, juga jika kurangnya pengawasan dari pemerintah dapat merusak keadaan alam yang membuat hilangnya hasil tangkapan, juga kurangnya fasilitas yang tersedia karena keterbatasan modal.

Penerapan *co-management* membutuhkan kerjasama berbagai pihak, nelayan sebagai pelaku utama mempunyai tugas penting dalam pengelolaan ini. Nelayan bekerja sama dengan pemilik kapal, pemilik kapal memberikan kapalnya kepada nelayan untuk mencari ikan, lalu hasil melaut dibagi dua antara nelayan dan pemilik kapal. *Co-management* tidak hanya berfokus antara nelayan dan pemilik kapal, juga kerjasama dengan PPI (Pusat Pendaratan Ikan), Kelompok Nelayan, dan Pemerintah. Menjual ikan hasil melaut adalah salah satu masalah yang dialami nelayan, oleh karena itu, PPI sebagai tempat nelayan menjual ikan secara lelang kepada penjual ikan. Kelompok nelayan mempunyai tugas dalam pengelolaan bersama yaitu wadah komunikasi, administrasi dan pendataan nelayan dengan Pemerintah. Semua pihak mempunyai peran yang penting dalam menjalankan pengelolaan perikanan jenis *co-management*, apabila ada pihak satu atau dua pihak yang tidak jalan, maka pengelolaan bersama ini tidak dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu perlunya pengelolaan bersama berbagai pihak.

Keberhasilan pengelolaan *co-management* dapat terjadi jika mendapat dukungan dari pemerintah dengan dukungan secara legal, maupun finansial menuju kearah kebijakan *co-management*. Adanya kemauan pemerintah untuk mendesentralisasai tanggung jawab dan wewenang kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

---

<sup>17</sup> Taufik Kurniawan, "Co-management antar Stakeholder sebagai Model public Private Partnership dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan" Jurnal AdBispreneur Vol. 2, No. 2, 2017, hal. 152

### C. Fokus Penelitian dan Sub- Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang ada, mengingatnya sangat luas pembahasan tentang sistem manajemen perikanan. Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak menimbulkan kekacauan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis akan membatasi ruang lingkup dan fokus pada masalah yang akan diteliti, pada pengelolaan perikanan dengan model *co-management* sumber daya perikanan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan Lampung Selatan berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana implementasi model *co-management* dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Lampung Selatan?
2. Bagaimana peran pengelolaan model *co-management* perikanan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lampung Selatan?
3. Bagaimana model *co-management* dalam meningkatkan kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam?

### E. Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi model *co-management* dalam pengelolaan sumber perikanan di Lampung Selatan.
2. Untuk menganalisis peran pengelolaan model *co-management* perikanan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lampung Selatan.



3. Untuk menganalisis model *co-management* perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pandangan ekonomi Islam.

## **F. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung atau secara tidak langsung dengan pihak yang berkepentingan seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan bagi akademik dan dan memberikan sumbangsih pendapat dan penilaian terhadap pengaruh model pengembangan *co-management* sumber daya perikanan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan juga dapat menambah literatur di lingkungan UIN Raden Intan Lampung, khususnya fakultas ekonomi dan bisnis Islam.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah, Stakeholder, dan Masyarakat**

Untuk dapat memberikan informasi kepada pemerintah, *stakeholder* yang terkait dan masyarakat sebagai rujukan pengambilan keputusan bahwa model pengembangan *co-management* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **b. Bagi Peneliti**

Sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan kemampuan kreativitas dalam memecahkan masalah ilmiah, serta dapat membandingkan teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan dengan penelitian langsung dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Intan Negeri Radein Intan Lampung.

### c. Bagi Peneliti Lain

Dapat menjadikan bahan referensi dan rujukan untuk melanjutkan penelitian tentang model pengembangan ekonomi berbasis *co-management* sumber daya perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari adanya temuan-temuan yang sama, penulis memberikan beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan penelitian model pengembangan ekonomi sumber daya perikanan berbasis *co-management* sumber daya perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa karya ilmiah yang dapat penulis pakai sebagai landasan teoritis dan rujukan untuk mendukung dalam penulisan skripsi yang penulis angkat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penelitian A. Muluk Alains, Septrianti Eka Putri, dan Prilia Haliawan yang berjudul, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM) Melalui Model Co-Management Perikanan*, penelitian ini menggunakan metode *kualitatif fenomenologis*, yang menghasilkan data deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder, lokasi penelitian di Bengkulu di 3 desa, dan TPI di Bengkulu. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan model *co-management* menyangkut pula pemberian tanggungjawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka. Dan juga di era otonomi daerah, menjadikan harapan dan sekaligus membuka permasalahan baru seiring dengan adanya pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya ini, yang diharapkan manfaat terbesar akan berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terutama masyarakatnya. Namun permasalahan yang dihadapi sekarang adalah seberapa besar keinginan dan komitmen pemerintah daerah untuk

mengelola sumberdaya di wilayahnya secara berkelanjutan.<sup>18</sup>

- 2) Penelitian Suherman Banon, Atmaja dan Duto Nugroho, di dalam jurnal yang berjudul, *Upaya-Upaya Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan di Indonesia*, Penelitian ini menggunakan analisis observasi lapang, data di gunakan dari data sekunder, Penelitian ini berisi konsep pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan terdapat tiga komponen penting yang berjalan dalam kondisi berimbang, yaitu: ekologi, sosial, dan ekonomi. Oleh karena nya harus ada rasa memiliki di benak masyarakat, maka dibutuhkan pengelolaan yang melibatkan masyarakat, agar masyarakat ikut berpartisipasi aktif. Pengelolaan *co management*, dimana pemerintah, masyarakat dan juga *stakeholder* bersama-sama dalam pengelolaan. Namun menurut mereka pengelolaan seperti masih ada kekurangannya, diantaranya 1) hanya bisa diterapkan untuk wilayah yang tidak terlalu luas, 2) kurang mendapat dukungan masyarakat 3) tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.<sup>19</sup>
- 3) Penelitian Partomo dkk, di dalam jurnal nya yang berjudul, *Pengelolaan Danau Berbasis Co-Management: Kasus Rawa Pening*, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, pengambilan data menggunakan *random sampling* melalui kuesioner, di dalam penelitian berisi dalam kondisi tanpa pengelolaan, eksploitasi membuat sumberdaya perikanan menjadi kompleks. Pengelolaan Rawa Pening bersifat multi *stakeholders* dengan berbagai peran dan kepentingan masing-masing yang mengakibatkan pengelolaan tidak terkontrol. Model pengelolaan terpusat (sentralistik) yang

---

<sup>18</sup> A. Muluk Alains, dkk, “*Pengelolaan Sumberdaya perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM) melalui model Co-Management Perikanan*” Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No. 2

<sup>19</sup> Suherman Banon, Atmaja dan Duto Nugroho, *Upaya-Upaya Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan di Indonesia*, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol. 3 No. 2, 2011

lebih di dominasi pemerintah dalam penentuan kebijakan telah mengakibatkan peran masyarakat sebagai pemanfaat sumberdaya tereduksi dan tidak efisien. Di lain pihak, pendekatan pengelolaan *community based* (berbasis masyarakat) tidak dapat menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya. Ketidakseimbangan distribusi antara peran pemerintah dan peran masyarakat pemanfaat sumberdaya menjadi latarbelakang pentingnya pendekatan *co-management* untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumberdaya dengan mengintegrasikan pengakuan hak dan kemitraan dari seluruh *stakeholders*.<sup>20</sup>

- 4) Penelitian dari Ratna Indrawasih di dalam jurnal yang berjudul *Co-Management Sumber Daya Laut Pelajaran Dari Pengelolaan Model Co-Fish Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat*, penelitian ini bersifat kualitatif, pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, lokasi penelitian di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian mendapatkan bahwa praktik pengelolaan lingkungan yang dilakukan *co-fish* merupakan cara yang baru, dan harus diterapkan di daerah yang lain. Keterlibatan *stakeholder* merupakan bagian penting karena membawa hasil yang positif, dalam upaya membantu pemerintah untuk mengelola lingkungan. Namun ditemui kendala aturan-atauran *co-management* belum dilaksanakan sepenuhnya, akhirnya pengelolaan yang terjadi belum optimal.<sup>21</sup>
- 5) Penelitian dari Lukman adam, di Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol. II No.2, yang berjudul *Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara)*, hasil penelitian ini, pengembangan perikanan harus

---

<sup>20</sup> Partomo, dkk, *Pengelolaan Danau Berbasis Co-Management: Kasus Rawa Pening*, Jurnal JPSSL Vol. 1 No.2, 2011

<sup>21</sup> Indrawasih, Ratna, *Co-Management Sumber Daya Laut Pelajaran Dari Pengelolaan Model Co-Fish Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Bijak dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol.3 No.2

memperhatikan keseimbangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Aspek lingkungan mencakup sistem alam, yang terdiri dari ikan, kualitas ekosistem, dan lingkungan bio fisik. Aspek sosial mencakup sistem manusia, termasuk sistem di dalamnya adalah nelayan, pengolah, dan masyarakat. Pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara holistik. Tidak bisa dipisahkan antara pemanfaatan ekonomi semata, namun juga harus ditinjau dari aspek lingkungan dan sosial.<sup>22</sup>

- 6) Penelitian dari Baino Ali Imron, di jurnal yang berjudul *Implementasi Permasalahan Model Co-Manajemen Dalam Pengelolaan Sumber daya Perikanan*, Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, Penelitian ini berisi tentang krisis pengelolaan sumber daya perikanan yang diakibatkan oleh adanya pemanfaatan sumber daya perikanan yang eksploitatif dan tidak memperhatikan aspek kelestarian. Negara telah menggeser paradigma bahwa pengelolaan bertumpu pada pemerintah, ke paradigma manajemen yang memberikan ruang yang lebih kepada masyarakat pengguna dalam proses perumusan dan implementasi kebijaksanaan. Ada bukti-bukti kuat bahwa penerapan ko manajemen merupakan solusi yang tepat terhadap permasalahan eksploitasi perikanan yang berlebihan. Di dalam penelitian ini salah satu faktor keberhasilan ko manajemen adalah adanya keinginan yang kuat yang disertai dengan kapabilitas (kemampuan) yang kuat dari semua pihak yang terlibat (pemerintah dan masyarakat) untuk berbagi tanggung jawab dalam mengelola sumberdaya perikanan yang bijaksana.<sup>23</sup>
- 7) Penelitian dari Witarsa, di dalam jurnal yang berjudul *Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir*

---

<sup>22</sup> Lukman Adam, *Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara*, Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol. II No.2, 2012

<sup>23</sup> Baino Ali Imron, *Implementasi Permasalahan Model Co-Manajemen Dalam Pengelolaan Sumber daya Perikanan*, Jurnal Ilmu Perikanan Vol.4 No.1, 2013

*Berbasis Co-Management Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Pontianak*, penelitian ini menggunakan metode penelitian partisipatif, menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara langsung dan tidak langsung dan menggunakan kuesioner. Isi dari jurnal masih banyaknya masalah dari sumber daya perikanan di Kabupaten Pontianak, diantaranya belum adanya batas wilayah tangkap dan kurangnya peralatan modal, dari aspek teknologi penangkapan belum memadai, dari aspek pasar belum ada manajemen distribusi, belum adanya armada angkut yang dilengkapi *cool storage*, dan masih rendah modal usaha, dari aspek sosial ekonomi pemegang kepentingan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, adanya kerusakan fisik habitat, kemiskinan penduduk pesisir, kurangnya pemahaman terhadap nilai sumberdaya dan masalah kelembagaan. Untuk mengatasi masalah yang begitu banyak, tidak bisa pemerintah mengelola sendiri, atau masyarakat yang mengambil peran. Mereka butuh manajemen yang membuat sinergi untuk semua pihak mengambil peran.<sup>24</sup>

- 8) Penelitian dari Maya Shafira dan Mashuril, di dalam jurnal yang berjudul, *Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat*, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, menggunakan data sekunder, penelitian ini berisi tentang kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan yang belum berpihak pada masyarakat pesisir khususnya nelayan di Provinsi Lampung. Kesejahteraan masyarakat pesisir Lampung masih menjadi persoalan seperti tidak stabilnya produksi olahan hasil perikanan, serta volume dan nilai ekspor cenderung menurun, hal inilah yang menyebabkan kemiskinan masih jadi persoalan nelayan hingga saat ini.

---

<sup>24</sup> Witarsa, *Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Co-Management Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Pontianak*, Jurnal *Economia*, Vol. 11 No. 1, 2015

Untuk mengatasi persoalan pengelolaan perikanan dengan kebijakan dekonstrasi tersebut, terdapat beberapa model yang ditawarkan yakni pengelolaan perikanan dengan berbasis masyarakat dan pengelolaan perikanan dengan model *co management*. Kedua model pengelolaan perikanan tersebut memiliki keunggulan tersendiri yang diharapkan dapat menciptakan pengelolaan perikanan berkelanjutan dan berkemakmuran.<sup>25</sup>

- 9) Penelitian dari Indah Susilowati, di dalam jurnal yang berjudul *Prospek Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Ekosistem: Studi Empiris di Karimunjawa*, Pendekatan analisis menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif, data primer di dapat melalui wawancara dengan panduan kuesioner, data sekunder di peroleh dari dari studi pustaka dan dokumentasi dari dinas dan institusi terkait. Hasil penelitian, model pengelolaan berbasis ekosistem ini digunakan karena model pengelolaan secara konvensional masih belum berhasil dalam mengelola sumber daya. Pengelolaan berbasis ekosistem dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek ekologi, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek kelembagaan dan aspek lingkungan. Dengan prioritas melakukan pemulihan dan menjaga kondisi tempat hidup (habitat) ikan, membuat kebijakan pengelolaan perikanan yang disesuaikan dengan nilai budaya masyarakat, membuat basis data jenis-jenis ikan yang ditangkap. Menurut penelitian ini pengelolaan sumber daya perikanan berbasis ekosistem (EBFM) memberikan indikasi yang prospektif.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Maya Shafira dan Mashuril, *Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat*, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol. 11 No. 2, 2021

<sup>26</sup> Indah Susilowati, *Prospek Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Ekosistem: Studi Empiris di Karimunjawa*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 14, No. 1, 2013

## H. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah adalah aplikasi secara formal dan sistematis dari metode ilmiah untuk mempelajari dan menjawab permasalahan. Tujuan penelitian identik dengan tujuan ilmu pengetahuan pada umumnya, yaitu membuat penjelasan, menyusun prediksi, serta mengendalikan fenomena yang terjadi di dalam suatu batasan yang ditentukan.<sup>27</sup>

Dalam melakukan penelitian ilmiah, harus memperhatikan metode yang tepat untuk penelitian kita. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>28</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut metode, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melaksanakan pengkajian data deskriptif. Data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen.<sup>29</sup> Penelitian ini bersifat analitis, artinya penulis berusaha untuk mendeskripsikan dan memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian tersebut yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ada. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna, dan mengkonstruksi fenomena dari pada generalisasi.<sup>30</sup>

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas

---

<sup>27</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jogjakarta: Penerbit Erlangga, 2009) hal. 3

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 2

<sup>29</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2014), hal. 5

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 26



tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.<sup>31</sup>

Menurut tempatnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan adalah penelitian dimana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya, sehingga sumber data dalam penelitian adalah sumber primer. Penelitian lapangan ini dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan, penelitian kepustakaan adalah dimana data tidak diperoleh dari lapangan tetapi dari perpustakaan atau tempat lain yang menyimpan referensi, dokumen-dokumen yang berisi data yang telah teruji validasinya.

## 2. Sumber Data

Untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian, dengan cara wawancara, cara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari responden yang lebih mendalam dan juga dengan responden yang sedikit.<sup>32</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.<sup>33</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

---

<sup>31</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: PustakaBaruPress, 2019) hal. 21-22

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 220

<sup>33</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Ramalan Kuantitatif untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 8

Lampung Selatan, dan juga diperoleh dari bahan-bahan laporan jadi yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.<sup>34</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung, dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>35</sup> Alasan peneliti mengambil teknik wawancara adalah agar peneliti dapat menggali informasi yang dibutuhkan dari narasumber yang terpercaya. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat dalam pengelolaan dengan model *co-management* yaitu Dinas Perikanan, Nelayan, dan *Stakeholders* (pihak terkait), beberapa *stakeholder* ini adalah PPI Dermaga Boom (Pusat Pendaratan Ikan), Pemilik Kapal, dan Kelompok Nelayan.

---

<sup>34</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019) hal. 32

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 465

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto penelitian dan lain sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan.

## 4. Metode Keabsahan data

Metode keabsahan data atau *trustworthiness* dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil informasi yang diperoleh dalam penelitian. Keabsahan suatu data dapat dilakukan dengan teknik pemeriksaan berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Moleong ada 4 kriteria dalam teknik pemeriksaan keabsahan data; yaitu 1) derajat kepercayaan (kredibilitas), 2) keteralihan, 3) ketergantungan, 4) kepastian<sup>36</sup>

Teknik pemeriksaan data yang digunakan untuk membuktikan kebenaran dan kepercayaan data tersebut dapat dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, audit ketergantungan dan audit kepastian. Dari berbagai macam teknik tersebut maka pemeriksaan data kriteria derajat kepercayaan digunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang benar-benar abash dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah cara untuk memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri sebagai keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Penelitian ini meggunakan triangulasi sumber, yaitu berarti membandingkan mencek ulang derajat kepercayaan

---

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2011), hal. 186

suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan hasil wawancara Dinas Perikanan tentang apa yang dikatakan dari hasil wawancara lalu dibandingkan dengan wawancara terhadap pihak lain yaitu Nelayan, PPI, Pemilik Kapal, dan Kelompok Nelayan juga membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang telah ada.

## 5. Informan Penelitian

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Non-Probability Sampling*.

Dalam penelitian ini menggunakan *non-probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi *sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball*.

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.

Penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

Penggunaan *Snowball Sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui keberhasilan dari model pengembangan ekonomi berbasis *co-management* sumber daya perikanan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut Moleong *key informan* adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Dalam menentukan *key informan*, penulis memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *key informan* yaitu orang yang tidak hanya terlibat langsung tetapi juga mampu menguasai kegiatan *quality control*. Maka dari itu *key informan* bisa ditentukan setelah melakukan penelitian terhadap informan.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.<sup>37</sup>

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>38</sup> Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hal. 334

<sup>38</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992) hal. 16

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformatasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

### **b. Penyajian Data**

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

### **c. Menarik Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1. Konsep *Co-Management*

*Co-management* perikanan didefinisikan sebagai suatu pengaturan (arrangement) dimana pengelolaan sumber daya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (*user group*) dan dipertimbangkan sebagai suatu pemecahan atas berkembangnya permasalahan eksploitasi sumberdaya perikanan yang berlebihan.<sup>39</sup>

Menurut Charbonneau, *Co-management* adalah sebagai suatu pengaturan kemitraan dimana masyarakat para pengguna sumberdaya lokal (nelayan), pemerintah, pengguna (*stakeholder*) lain (pemilik perahu, pedagang ikan, pembuat perahu, bisnis, dan lain-lain) dan agen eksternal (Organisasi non pemerintahan), akademis dan lembaga; institusi riset) berbagi tanggung jawab dan otoritas untuk pengelolaan perikanan. *Co management* sering juga disebut partisipasi, kerjasama, *stakeholder multi-party* atau manajemen kolaboratif.<sup>40</sup>

Pengertian *Co-Management* menurut Pomeroy yaitu, "*Co-Management can be defined as a partnership arrangement in which the community of local resource users (fishers), government, other stakeholders (boat owners, fish traders, boat builders, business people, etc) and external agents (non-governments organizations (NGOs), academic and research institutions) share the responsibility and authority for the management of the fishery*".<sup>41</sup>

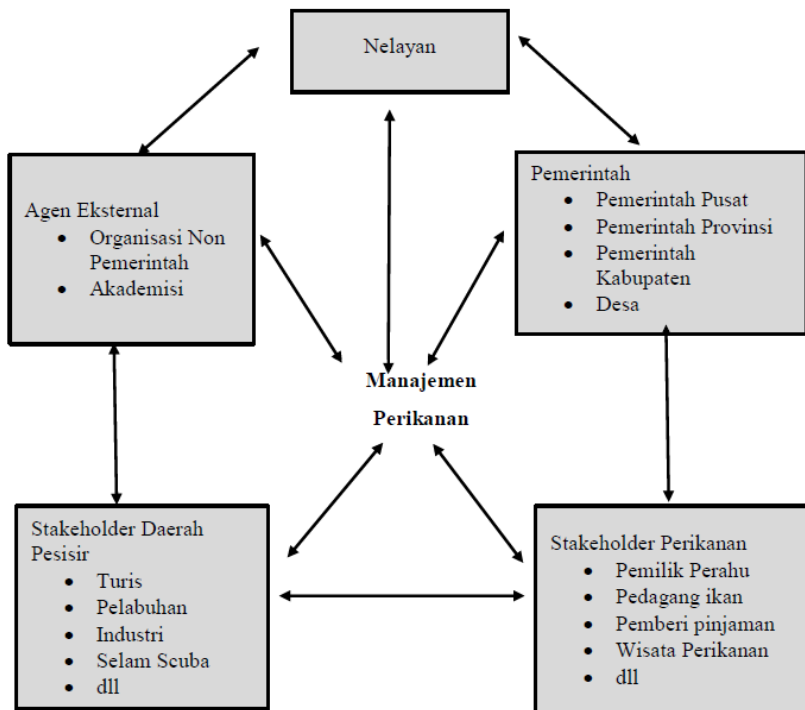
---

<sup>39</sup> Ali Imron, Baino, *Implementasi dan Permasalahan Model Co-Manajemen Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*, Jurnal Ilmu Perikanan Vol. 4 No. 1, 2013, hal. 46

<sup>40</sup> Banon, S, et al, *Upaya- Upaya Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan*, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol. 3 No. 2, 2011, hal. 108

<sup>41</sup> Pomeroy S. Robert dan Rebeca Rivera-Guieb, *Fishery Co-Management: A Practical Handbook*, (Cambridge USA: Cabi Publishing, 2006) hal. 7-8





Gambar 1. Kemitraan *Co-Management*<sup>42</sup>

*Co management* yaitu suatu model pengelolaan sumberdaya baik fisik maupun non fisik yang melibatkan berbagai stakeholder terkait. Tujuannya selain untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, juga sebagai koreksi, mengingat kegagalan praktik pengelolaan baik yang bertumpu pada kebijakan pemerintah maupun yang bertumpu pada masyarakat, yang masih memiliki kelemahan mendasar.<sup>43</sup> Kekurangannya jika pengelolaan bertumpu pada pemerintah adalah kurangnya pengawasan kebijakan yang sudah

<sup>42</sup> Pomeroy S. Robert dan Rebeca Rivera-Guieb, *Fishery Co-Management: A Practical Handbook*, (Cambridge USA: Cabi Publishing, 2006) hal. 8

<sup>43</sup> Taufik Kurniawan, "Co-management antar Stakeholder sebagai Model public Private Partnership dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan" *Jurnal AdBispreneur* Vol. 2, No. 2, 2017, hal. 152

ditetapkan, apalagi kalau daerah tersebut memiliki daerah yang luas. Selain itu biaya yang dibutuhkan sangat besar untuk membantu kebijakan. Lalu jika kebijakan pengelolaan bertumpu pada masyarakat, akan banyak sekali konflik karena persaingan yang tidak terkontrol, juga jika kurangnya pengawasan dari pemerintah dapat merusak keadaan alam yang membuat hilangnya hasil tangkapan. Dan juga kurangnya fasilitas yang tersedia karena keterbatasan modal.

Ada empat pemangku kepentingan dan mitra utama dalam *co-management* dalam pengelolaan berbasis masyarakat yaitu, *Resource users* (nelayan, keluarga dan rumah tangganya, kelompok nelayan), Pemerintah (pusat, regional, lokal), *Stakeholder* lain (anggota kelompok, pemilik kapal, pedagang ikan, pembuat kapal, pebisnis, dan lain-lain), Agen perubahan (organisasi non pemerintah, akademisi dan institusi penelitian, lembaga pembangunan).<sup>44</sup>

### **1. Nelayan (*Resource Users*)**

Komunitas lokal terdiri dari individu-individu dengan kepentingan yang berbeda dalam *co management* sumber daya laut dan pesisir. Di tingkat masyarakat, proyek pengelolaan bersama biasanya memiliki target nelayan utama, yaitu individu yang mata pencahariannya memanen dan memanfaatkan laut dan sumber daya pesisir. Nelayan adalah individu yang melalui penggunaan sumber daya, yang secara langsung berdampak padanya dan yang pada gilirannya terkena dampak langsung oleh langkah-langkah manajemen. Nelayan dianggap oleh banyak orang sebagai pengelola sumber daya sehari-hari yang sebenarnya, dan karena itu, harus menjadi peserta aktif dalam pengelolaan. Nelayan biasanya menjadi target pengorganisasian dan pengembangan kapasitas.

Kelompok nelayan adalah kelompok formal dan informal masyarakat lokal nelayan yang didirikan untuk mendukung kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan

---

<sup>44</sup> Pomeroy S. Robert dan Rebeca Rivera-Guieb, *Fishery Co-Management: A Practical Handbook*, (Cambridge USA: Cabi Publishing, 2006) hal. 34-35

lingkungan kepentingan anggotanya atau masyarakat secara keseluruhan. Grup-grup ini memainkan peran penting untuk mempertemukan para nelayan yang memiliki kepentingan yang sama mengenai sumber daya dan mata pencaharian.

## 2. Pemerintah (*Government*)

Baik unit pemerintah nasional maupun lokal (yaitu pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa) memiliki yurisdiksi (kewenangan berdasarkan hukum) atas perikanan dan sumber daya pesisir. Setiap tingkat pemerintahan memiliki mandat, kewenangan dan tanggung jawab.

Kebijakan dan program pemerintah semakin menekankan perlunya partisipasi nelayan yang lebih besar dan pengembangan organisasi lokal untuk menangani beberapa aspek manajemen sumber daya. Pemerintah harus bagaimanapun, tidak hanya meminta lebih banyak keterlibatan dan partisipasi nelayan, tetapi juga membangun hak dan wewenang hukum yang sepadan dan menyerahkan sebagian kekuasaannya. Pendelegasian wewenang dan pembagian kekuasaan untuk mengelola sumberdaya mungkin salah satu tugas tersulit dalam membangun *co-management*. Pemerintah tidak hanya harus mendorong kondisi untuk partisipasi pengguna sumber daya tetapi juga mempertahankannya.

Sebagai langkah pertama, pemerintah nasional harus menetapkan kondisi untuk (atau setidaknya tidak menghalangi) program pengelolaan model *co-management* untuk muncul dan berkembang. Minimal pemerintah tidak boleh menentang hak nelayan untuk mengadakan pertemuan untuk membahas masalah dan solusi, serta mengembangkan organisasi dan kelembagaan pengaturan (hak dan aturan) untuk manajemen. Nelayan harus merasa aman untuk secara terbuka mengadakan pertemuan atas inisiatif mereka dan mendiskusikan masalah dan solusi dalam forum publik. Mereka tidak boleh merasa terancam jika mereka mengkritik pemerintah yang ada kebijakan dan metode manajemen.

Langkah kedua, nelayan harus diberikan akses kepada pemerintah dan pejabat pemerintah untuk mengungkapkan keprihatinan dan ide-ide mereka. Nelayan harus merasa bahwa pejabat pemerintah akan mendengarkan dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Langkah ketiga, nelayan harus diberi hak untuk mengembangkan organisasi mereka sendiri dan membentuk jaringan dan koalisi untuk kerjasama. Terlalu sering pembentukan organisasi yang disponsori pemerintah yang diakui secara resmi tetapi tidak efektif karena tidak mewakili nelayan. Namun, ini mungkin satu-satunya jenis organisasi yang diizinkan oleh pemerintah. Nelayan harus bebas mengembangkan organisasi atas inisiatif mereka sendiri yang memenuhi kebutuhan mereka itu sah bagi mereka. Masalahnya adalah kesediaan pemerintah untuk berbagi wewenang dan tanggung jawab dengan organisasi nelayan dan apa fungsi dan bentuknya.

Salah satu perdebatan mendasar dalam pengelolaan bersama adalah persepsi bahwa nelayan tidak selalu dapat dipercaya untuk mengelola sumber daya sendiri. Kecuali kalau pemerintah dan pejabat yang melaksanakan kebijakan pemerintah dapat yakin akan keinginan dan kemampuan nelayan untuk mengelola dirinya sendiri, bukan banyak kemajuan dapat dibuat dalam pengelolaan bersama. Pengakuan dan penerimaan manajemen tingkat lokal adalah sebagian tugas nelayan untuk mengambil tanggung jawab baru, untuk mengatur diri mereka sendiri dan, pada kemampuan masyarakat lokal, untuk menguasai sumber daya yang bersangkutan. Di samping itu, komunitas dan agen perubahan sering menunjukkan bahwa manajer sumber daya pemerintah enggan berbagi wewenang. Dalam hal ini, rekan-rekan yang sudah '*bought into*' (sesuatu) pengelolaan bersama dan/atau program pendidikan yang ditargetkan dapat digunakan untuk menginformasikan dan mudah-mudahan, membujuk manajer sumber daya untuk mendukung pengelolaan bersama. Meskipun ada kasus yang menunjukkan

bagaimana politisi dapat menggunakan manajemen bersama untuk mengejar tujuan pribadi mereka dan bertahan pada politik kekuasaan, itu akan menjadi kesalahan untuk menafsirkan ini untuk semua sumber daya pemerintah manajer dan pejabat. Keberhasilan *co-management* pada dasarnya didasarkan pada kepercayaan yang diperluas diantara para mitra dan komitmen untuk secara kolektif bekerja menuju visi bersama.<sup>45</sup>

Peran utama unit pemerintah daerah adalah untuk mendukung inisiatif pengelolaan bersama dalam yurisdiksinya. Di banyak negara unit pemerintah daerah memiliki banyak wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola perikanan dan sumber daya pesisir dalam yurisdiksinya. Otoritas ini dan tanggung jawab mungkin bersifat historis atau mungkin baru-baru ini di desentralisasi dari pemerintah pusat. Harus ada kemauan politik diantara 'elit kekuasaan' politik lokal untuk mendukung pengelolaan bersama. Selain itu, staf lokal dan pejabat pemerintah juga harus mendukung dan secara aktif mendukung program pengelolaan bersama.

### **3. Stakeholders (Pemangku Kepentingan) dan Stakeholder Lain**

*Stakeholder* dalam *co-management* berbasis masyarakat dapat di definisikan sebagai individu, kelompok atau organisasi dari orang-orang yang tertarik, terlibat atau terpengaruh (secara positif atau negatif) oleh penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Ini mungkin berasal dari kedekatan geografis, asosiasi historis, ketergantungan untuk penghidupan, mandat instusional, kepentingan ekonomi, atau berbagai perhatian lainnya. *Stakeholders* di masyarakat pesisir meliputi nelayan, keluarga dan rumah tangganya, pemilik perahu, pedagang ikan, kelompok berbasis masyarakat, nelayan musiman atau paruh waktu, pemilik bisnis lokal, otoritas tradisional setempat, pejabat pemerintah terpilih,

---

<sup>45</sup> Pomeroy S. Robert dan Rebeca Rivera-Guieb, *Fishery Co-Management: A Practical Handbook*, (Cambridge USA: Cabi Publishing, 2006) hal. 36-40

perwakilan lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, dan lain-lain. Mungkin ada *stakeholder* yang berbeda tergantung pada kepentingan mereka, cara mereka memahami masalah dan peluang tentang sumber daya laut dan pesisir dan persepsi yang berbeda tentang dan kebutuhan untuk pengelolaan.<sup>46</sup>

Sejumlah anggota masyarakat setempat lainnya secara langsung dan tidak langsung menjadi *stakeholder* dalam *co-management* berbasis masyarakat. *Stakeholder* ini akan memiliki minat yang berbeda-beda dalam terlibat dalam pengelolaan bersama, sebagian bergantung pada kepentingan ekonomi mereka di nelayan dan sumber daya. Misalnya, pedagang ikan yang terlibat dalam hubungan jual/beli dengan nelayan tidak boleh mendukung pengorganisasian nelayan untuk terlibat dalam pengelolaan bersama karena itu bisa menjadi ancaman potensial bagi hubungan mereka. Ini akan menjadi penting untuk melibatkan pedagang ikan dalam proses pengelolaan bersama.

Peran masing-masing *stakeholder* ini dalam *co-management* berbasis masyarakat akan berbeda dan spesifik lokasi. Beberapa *stakeholder* antara lain:

- a. Pengusaha: Pengusaha lokal seperti pemilik perahu, pedagang ikan, pengolah ikan, pembuat perahu, pemilik hotel, pemandu rekreasi memancing, akuakultur dan perusahaan pelayaran semuanya menggunakan sumber daya laut dan pesisir dan memiliki kepentingan ekonomi yang kuat dalam masalah pengelolaan sumber daya. Ketika mereka mungkin tidak harus menjadi peserta langsung, minimal mereka harus dikonsultasikan dan dididik agar tidak mengganggu proses *co-management*. Pengusaha lokal dapat memberikan insentif dan pendanaan untuk pengguna sumber daya untuk mengelola sumber daya.
- b. Kelompok berbasis masyarakat: kelompok formal dan informal masyarakat lokal anggota yang dibentuk untuk

---

<sup>46</sup> Pomeroy S. Robert dan Rebeca Rivera-Guieb, *Fishery Co-Management: A Practical Handbook*, (Cambridge USA: Cabi Publishing, 2006) hal.33-40

mendukung aspek sosial, budaya, gender, ekonomi, dan kepentingan lingkungan anggotanya atau masyarakat secara keseluruhan. Mungkin ada berbagai kelompok berbasis komunitas kelompok perempuan, kelompok organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi pelayanan. Bisa juga ada kelompok berbasis komunitas, selain berbasis komunitas kelompok nelayan, yang berkepentingan langsung dengan perikanan dan sumber daya pesisir, seperti: sebagai asosiasi pemasaran ikan wanita atau organisasi budidaya pesisir. Kelompok berbasis komunitas ini memainkan peran penting untuk menyatukan individu dan kelompok dengan minat yang sama. Grup-grup ini memiliki pengetahuan lokal, keterampilan dan sumber daya, ikatan yang kuat dengan masyarakat dan kepercayaan dan kepercayaan masyarakat setempat.

- c. Pengguna sumber daya paruh waktu dan musiman: di banyak area, ada sejumlah pengguna sumber daya paruh waktu atau musiman yang bergantung pada sumber daya untuk sebagian mata pencaharian, pendapatan, dan makanan mereka. Ini mungkin petani dataran tinggi yang datang ke pantai untuk memancing di musim kemarau atau nelayan yang bermigrasi mengejar pelagis kecil. Meskipun bukan bagian dari komunitas penduduk, mereka adalah bagian dari komunitas pengguna sumber daya. Tindakan manajemen tertentu dapat mempengaruhi mata pencaharian, pendapatan, dan ketahanan pangan mereka.
- d. Organisasi manajemen sumber daya: di beberapa negara, undang-undang menganjurkan pembentukan dewan pengelolaan sumber daya kolaboratif yang memiliki perwakilan pemerintah dan masyarakat. Dewan dan dewan ini memberikan keahlian teknis dan melayani dalam kapasitas penasihat untuk pemerintah. Organisasi-organisasi ini dapat menjadi mitra penting dalam *co-management*.

Ada 5 bentuk *co-management* menurut Pomeroy, yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a) *Co-Management Instructive*, pada bentuk ini, tidak begitu banyak informasi yang saling di pertukarkan antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, hanya menginformasikan kepada masyarakat tentang rumusan–rumusan pengelolaan kelautan dan perikanan yang pemerintah rencanakan untuk dilaksanakan.
- b) *Co-Management Consultative*, menempatkan masyarakat pada posisi yang hampir sama dengan pemerintah. Oleh karena itu, ada mekanisme yang membuat pemerintah berkonsultasi dengan masyarakat. Meskipun masyarakat bisa memberikan berbagai masukan pada pemerintah, keputusan apakah masukan tersebut harus digunakan tergantung sepenuhnya pada pemerintah.
- c) *Co-Management Cooperative*, bentuk ini menempatkan masyarakat dan pemerintah pada posisi yang sama atau sederajat. Semua tahapan sejak pengumpulan informasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pemantauan institusi *co-management* berada di pundak kedua pihak.
- d) *Co-Management Advocative*, pada bentuk ini, peran masyarakat cenderung lebih besar dari peran pemerintah. Peran pemerintah lebih banyak bersifat mendampingi masyarakat atau memberikan advokasi pada masyarakat tentang apa yang sedang mereka kerjakan.
- e) *Co-Management Informative*, di satu pihak peran pemerintah makin berkurang dan di pihak lain peran masyarakat lebih besar. Pemerintah hanya memberikan informasi pada masyarakat tentang apa yang sepatutnya dikerjakan oleh masyarakat. Dalam kondisi yang lebih nyata, pemerintah menerapkan delegasi untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam.

---

<sup>47</sup> Pomeroy S. Robert dan Rebeca Rivera-Guieb, *Fishery Co-Management: A Practical Handbook*, (Cambridge USA: Cabi Publishing, 2006) hal. 8



Dalam jangka panjang *co-management* diyakini akan memberikan dampak ke arah yang lebih baik, yaitu:

- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya pesisir dan laut dalam menunjang kehidupan,
- b) Meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan secara terpadu,
- c) Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.<sup>48</sup>

Di penjuru dunia banyak terjadi cadangan ketersediaan ikan telah terjadi kelebihan tangkap (*overfishing*) dan terjadi kelebihan kapasitas (*over capacity*) pada sumber daya perikanan dan kelautan yang ada. Permasalahan lain yang terjadi yaitu banyak terjadi *illegal fishing*, hal ini bukan hanya berdampak negatif terhadap aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi. Maka dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan jangan merusaknya.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar Ruum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤

Artinya:

“Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut, disebabkan karena perbuatan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar” (Q.S. Ar Ruum:41)

Pengelolaan *co-management* adalah salah satu usaha untuk menjaga dari kerusakan laut, yang menjadi tempat untuk mencari ikan. Maka menjadi peran pemerintah untuk menegakan peraturan dari segala potensi kerusakan.

---

<sup>48</sup> Witarsa, *Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Ekonomi Pesisir Berbasis Co-Mangament Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Pontianak*, Jurnal *Economia*, Vol. 11 No. 1, hal. 29

## 2. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Bentham yaitu mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang di kembangkan nya, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.<sup>49</sup>

Kesejahteraan menurut BAPPENAS, kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki, dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.<sup>50</sup>

Kesejahteraan menurut *United Nations Development Program* (UNDP), kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain memasukan penilaian, "adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik".<sup>51</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.<sup>52</sup>

### 1. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

---

<sup>49</sup> Oman Sukmana, "*Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*", Jurnal Sospol, Vol 2 No. 1 (2016), hal. 103.

<sup>50</sup> Bappenas-Indonesia, diakses Selasa, 14 Desember 2021

<sup>51</sup> UNDP-Indonesia, diakses Selasa, 14 Desember 2021

<sup>52</sup> Amirus Sodik, "*Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*" Equilibrium 3, No. 2 (2016), hal. 380-405

Pengukuran kesejahteraan sering menggunakan pembagian kesejahteraan ke dalam dua bagian yaitu kesejahteraan subjektif dan objektif. Pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif yaitu berkaitan dengan aspek psikologis yang diukur dengan kebahagiaan dan kepuasan sedangkan menurut kesejahteraan mengukur kesejahteraan bersifat objektif menggunakan patokan yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan perkapita dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup dengan layak.

a. Indikator Kesejahteraan Secara Umum

Menurut BKKBN ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Seluruh anggota pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS (pasangan usia subur) ingin mengikuti KB ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern. Dari penjeleasan indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

1) Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan menjadi tiga golongan yaitu:

(a) Tinggi ( $>$  Rp. 5.000.000)

(b) Sedang (Rp. 1.000.000-Rp. 5.000.000)

(c) Rendah (<Rp. 1.000.000)

2) Konsumsi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang penelitian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan yang menghasilkan rumah tangga yang berpenghasilan rendah makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan <80% dari pendapatan.

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang serupa nilai-nilai luhur yang hasilnya kewajiban untuk memenuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku jiwa patriotisme dan

sebagainya. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.

#### 4) Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar negara adalah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pendapatan riil perkapita).<sup>53</sup> Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera melalui pangan, sandang, dan papan.

#### 5) Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Pusat Statistik dikatakan bahwa perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 m dan bagian terluas dari rumah bukan tanah dan penguasaan tempat tinggal adalah milik sendiri.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan menghadapi berbagai tantangan, seperti arus globalisasi, yurisdiksi otonomi daerah dan pemberdayaan nelayan miskin. Peningkatan kesejahteraan nelayan di samping dipengaruhi oleh faktor internal seperti pendidikan, pengalaman,

---

<sup>53</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Indeks Pembangunan Manusia*, hal. 13

penguasaan teknologi dan akumulasi modal (tabungan) nelayan yang rendah, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti potensi sumber daya, mekanisme pasar dan harga ikan, yurisdiksi daerah otonomi, keadaan infrastruktur pelabuhan perikanan dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan modernisasi usaha perikanan skala kecil secara nasional.

### b. Konsep Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan hadir kesejahteraan. Namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi. Konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam, tergantung pada perspektif apa yang digunakan. Menurut perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan dapat merujuk QS : Quraisy : 1-4,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ قُرَيْشٌ ۙ ۱ الْفَهْمِ رَحَلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ ۲ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا  
الْبَيْتِ ۚ ۳ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ ۴

Artinya:

- 1) *Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,*
- 2) *(yaitu) kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas,*
- 3) *Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah),*
- 4) *Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.*

Jika merujuk pada ayat ini ada empat indikator utama yaitu sistem nilai Islami, kekuatan ekonomi disektor riil (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan

dasar dan sistem distribusi, serta keamanan dan ketertiban sosial.<sup>54</sup>

Kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat diraih apabila aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik dapat diwujudkan secara nyata. Karena itu, membangun kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik, merupakan prasyarat utama bagi tercapainya kondisi kesejahteraan masyarakat.

*Maslahah* adalah suatu konsep yang mendasarkan pada dua aspek utama, yaitu manfaat dan berkah. Kemaslahatan akan tercapai ketika yang muncul dari sebuah proses adalah kemanfaatan dan keberkahan. Namun demikian tidak semua yang bermanfaat akan membawa keberkahan, akan tetapi, semua yang berkah pasti bermanfaat.

Agar kebijakan yang dihasilkan dapat membawa manfaat dan keberkahan, ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu,

- a) Kebijakan tersebut harus sesuai dengan *maqashid syariah* atau tujuan (objektif) syariat Islam. Yaitu melindungi agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.
- b) Dasar orientasi kebijakan tersebut adalah pada perlindungan kepentingan kaum dhuafa.

Aspek penunjang kesejahteraan selanjutnya yaitu aspek tata kelola perekonomian, ada tiga hal yang fundamental untuk tata kelola perekonomian yaitu transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas (amanah dan *masulliyah*). Transparansi sangat erat kaitanya dengan keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses informasi kepada publik. Indikator kedua yaitu profesionalitas, merupakan prinsip dasar yang akan menjamin bekerjanya mesin perekonomian, serta menentukan kualitas output yang dihasilkan. Islam pun mengajarkan untuk senantiasa profesional (*itqan*). Sehingga segala potensi dan sumber

---

<sup>54</sup>Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyiyanti, *Ekonomi pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) hal. 28

daya yang dimiliki dapat dioptimalkan. Profesional juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan yang perekonomian dalam mencapai tujuannya.

Indikator terakhir yaitu akuntabilitas atau pertanggung jawaban, dalam Islam selalu mengajarkan seperti itu, setiap orang pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan. Dalam aspek tata kelola perekonomian, sangat erat kaitanya dengan aspek administratif dan aspek etika.<sup>55</sup>

Kemiskinan di daerah pesisir merupakan masalah yang sudah lama belum mampu diselesaikan secara keseluruhan. Kemiskinan masyarakat pesisir juga disebabkan oleh kurang tergalinya sumber daya perikanan daerah setempat karena minimnya teknologi pengolahan dan juga pengetahuan akan pengolahan dan juga pengetahuan akan pengolahan tersebut disamping masalah permodalan. Akibatnya masyarakat pesisir tersebut menjadi masyarakat yang terpinggirkan karena kemiskinan, juga berdampak pada masalah lain diantaranya pendidikan, kesehatan, dan keadaan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks ini, sangat tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan kesejahteraan manusia yang mencakup kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*<sup>56</sup>

- a) *Dharuriyat*, adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dharuriyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. *Dharuriyat* menunjukkan kebutuhan dasar atau pun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, *dharuriyat* terbagi menjadi lima poin yang bisa dikenal dengan *al-kulliyat al khamsah*, yaitu agama, jiwa akal, keturunan dan harta benda. Dengan cara memenuhi

---

<sup>55</sup>Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsiyanti, *Ekonomi pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) hal. 30-32

<sup>56</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Bandung: Kencana, 2011), hal. 164



kebutuhan kelima diatas,yang apabila tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia. Seperti yang telah dikemukakan oleh Al-Ghazali, bahwa kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, ia menitik bertakan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahah ad-diin wa ad-dunya*) merupakan tujuan utamanya”.

- b) *Hajiyat*, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkankemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. *Hajiyat* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah *Value* atau nilai kehidupan manusia.
- c) *Tahsiniyat*, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. *Tahsiniyat* juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

*Stakeholder* masyarakat pesisir (pemerintah, masyarakat pesisir yaitu: nelayan, pengolah, pedagang dan lembaga-lembaga terkait lainnya) harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan memberikan program-program yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat pesisir baik program untuk meningkatkan produktivitas dengan menjaga kelestariannya, maupun distribusi produk ikan pada pasar domestik dan ekspor, serta mata pencaharian alternatif lainnya.<sup>57</sup>

### 3. Ekonomi Islam

Menurut Umer Chapra, ilmu ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan *maqashid*, tanpa

---

<sup>57</sup> Mimit Primyastanto, *Ekonomi Perikanan Kajian Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Teknologi Tepat Guna*, (Malang: Intelegensia Media, 2015) hal. 2

mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan mikroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat.<sup>58</sup>

Secara umum tujuan ekonomi Islam dapat digolongkan sebagai berikut.

- a) Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
- b) Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat.
- c) Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.<sup>59</sup>

Perbedaan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya terletak pada hal-hal berikut.

- a) Sumber daya merupakan kepemilikan mutlak dari Allah SWT. Yang diamanahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka memaksimalkan produksi dengan tujuan memberikan kesejahteraan pada kehidupan umat di dunia.
- b) Islam mengakui kepemilikan pribadi dengan memberikan beberapa batasan. Pertama, kepemilikan pribadi diakui dalam Islam tetapi tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat sekitar. kedua, Islam melarang seorang muslim untuk memperoleh pendapatan yang berasal dari jalan yang tidak halal dan *thayib*. Ketiga, pelarangan terhadap penimbunan.
- c) Ekonomi Islam menggunakan model kerjasama dalam aktivitas ekonominya, sementara ekonomi pasar (*free market economic*) menggunakan teknik sebaliknya dalam mencapai keseimbangan.

---

<sup>58</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2016) hal. 2

<sup>59</sup> Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) hal.19-20

- d) Sistem ekonomi Islam menentang adanya akumulasi dan konsentrasi kekayaan pada sekelompok individu atau golongan. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap harta harus diproduktifkan agar memberikan kontribusi positif dalam menggerakkan perekonomian.
- e) Ketika ekonomi pasar (*free market economic*) di dominasi oleh industri yang bersifat monopoli dan oligopoli, sistem ekonomi Islam menganjurkan kepemilikan dan manajemen publik atas berbagai sumber daya yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat.
- f) Seorang Muslim harus menyadari bahwa segala aktivitas ekonominya selalu diamati oleh Allah SWT. sehingga berbagai tindakan yang melanggar aturan syariat Islam akan dihindari. Hal ini merupakan nilai dasar yang mengarahkan perilaku individu dalam aktivitas ekonominya.<sup>60</sup>

Di dalam menjalankan kehidupan berekonomi, di dalam ekonomi Islam harus terjalin kerjasama dan keadilan ekonomi merupakan spirit ekonomi Islam, atau merupakan ajaran jiwa ajaran *tauhid*, maka diperlukan suatu tipe rancangan struktural (*struktural arrangement*) agar merubah spirit menjadi kenyataan dan terutama dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan-kebutuhan dimana saja dan kapan saja.

Sejumlah unsur dapat memberi sumbangan bagi penyusunan rancangan struktural macam ini. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut.

- a) Pemerintah, semenjak awal Islam mengakui posisi pemerintah dalam pengelolaan ekonomi. Pada setiap masyarakat yang terorganisasi, terdapat penguasa/otoritas untuk mengawasi, mengkoordinasikan perekonomian dan memberi arah baginya untuk bergerak. Pemerintah dituntut untuk

---

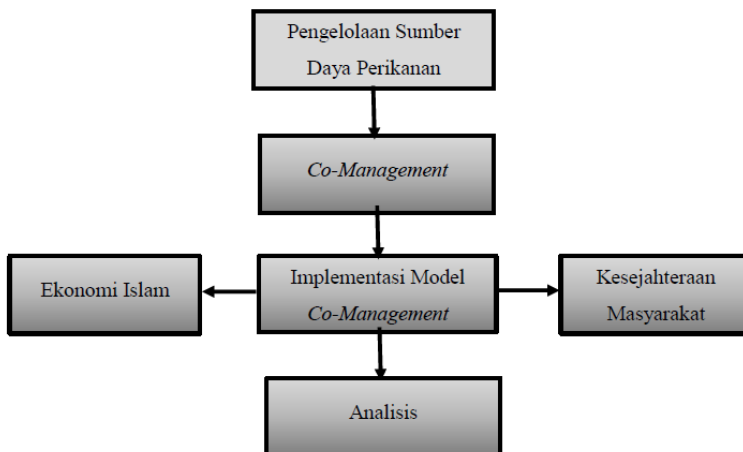
<sup>60</sup> Nur Riano Al Arif, M, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) hal. 21

membayai pengeluaran-pengeluaran tertentu sebagaimana ditetapkan oleh syariah. Dalam ekonomi yang lebih kompleks seperti dewasa ini, tugas utama pemerintah adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik tertentu, dan untuk ini pemerintah dituntut untuk menjamin kelancaran kegiatan-kegiatan ekonomi.

- b) Sektor swasta, dipandang amat penting dalam kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Kreativitas dan individu sangat dihargai dalam skema organisasi ekonomi menurut Islam. Individu sepenuhnya diakui untuk memiliki dan memutuskan kegiatan-kegiatan ekonomi menurut pilihan mereka, dalam kerangka aturan-aturan syariah.<sup>61</sup>

#### 4. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang diteliti.



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

<sup>61</sup>Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) hal. 12-13

Dalam suatu sistem ekonomi, ekonomi tidak akan berjalan apabila tidak ada manajemen atau pengelolaan yang tepat. Begitupun dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Pengelolaan merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan sumber daya perikanan mempunyai banyak model. Diantara banyak pengelolaan perikanan mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Namun yang diperlukan model yang paling efektif sesuai dengan tempat, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini menggunakan model *co-management* dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Pengelolaan model *co-management* banyak melibatkan berbagai pihak. Diantaranya masyarakat, *stakeholder*, dan pemerintah. Masyarakat sebagai pengguna sumberdaya harus ikut serta dalam pengelolaan. *Stakeholder* mempunyai peran besar dalam pengelolaan. Diantaranya penyedia kapal dan alat tangkap, dan juga sebagai distributor ikan tangkapan. Sedangkan pemerintah berperan sebagai pengambil kebijakan dan pengawasan sumber daya.

Permasalahan pengelolaan model *co-management* pada implementasinya, karena belum banyak contoh daerah yang memakai *co-management* sebagai sistem atau model pengelolaan. Diharapkan model pengelolaan ini memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat yang ditunjukkan pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan dapat tercapai, implementasi pengelolaan perikanan harus diterapkan dengan tepat dan jelas. Islam mengajarkan pengelolaan yang adil, saling menguntungkan, dan saling tolong menolong. Tercapainya kesejahteraan masyarakat dipandang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

Akhmad Fauzy dan Suzy Anna, *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perpektif Maqashid Al-Syariah*, Bandung: Kencana, 2011.

Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan Edisi Keenam*, Jakarta: BPFE Yogyakarta, 2002.

Irfan Syauqi Beik, dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi pembangunan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Istijianto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2005.

J. Supranto, *Metode Penelitian Ramalan Kuantitatif untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departmen Nasional, 2008.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2011.

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

M. Fedi Sondita, *Manajemen Sumber Daya Perikanan*, Penerbit Universitas Terbuka.

Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Vol. II No.2, 2012.

- Mimit Primyastanto, *Ekonomi Perikanan Kajian Pemberdayaan Masyarakat Pesisir berbasis Teknologi Tepat Guna*, Malang: Intelegensia Media, 2015.
- Mimit Primyastanto, *Ilmu Kelautan dan Perikanan*, Malang: Intrans Publishing, 2017.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Nurul Huda, Handi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, dan Ranti Wiliasih, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Penamedia Group, 2016.
- Pomeroy S. Robert, dan Rebeca Rivera-Guieb, *Fishery Co-Management: A Practical Handbook*, Cambridge USA: Cabi Pulishing, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: PustakaBaruPress, 2019.
- Witarsa, *Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Ekonomi Pesisir Berbasis Co-Mangament Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Pontianak*, Jurnal *Economia*, Vol. 11 No. 1.

## **Jurnal**

- Agus et al, *Penentuan Insikator Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan (Ecosystem Approach to Fisheries Management)*. Bogor: Direktorat Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, WWF-Indonesia dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor.
- A. Muluk Alains, Seprianti Eka Putri, dan Prilia Haliawan, *Pengelolaan Sumberdaya perikanan Berbasis Masyarakat*

*(PSPBM) melalui model Co-Management Perikanan, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No. 2, 2009.*

Baino Ali Imron, *Implementasi dan Permasalahan Model Co-Manajemen Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Jurnal Ilmu Perikanan Vol. 4 No. 1, 2013.*

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Indeks Pembangunan Manusia, 2018*

Lukman Adam, *Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara), Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol. II No.2, 2012.*

Partomo, Sjafriz Mangkuprawira, Aida Vitayala S. Hubeis, dan Luky Adrianto, *Pengelolaan Danau Berbasis Co-Management: Kasus Rawa Pening, Jurnal JPSL Vol. 1 No. 2, 2011.*

Ratna Indrawasih, *Co-Management Sumber Daya Laut Pelajaran Dari Pengelolaan Model Co-Fish Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jurnal Bijak dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol.3 No.2, 2008.*

Suherman Banon, Atmaja dan Duto Nugroho, *Upaya-Upaya Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan di Indonesia, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol. 3 No. 2, 2011.*

Taufik Kurniawan, *Co-management antar Stakeholder sebagai Model public Private Partnership dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan” Jurnal AdBispreneur Vol. 2, No. 2, 2017.*